

BAB I

PENDAHULUAN

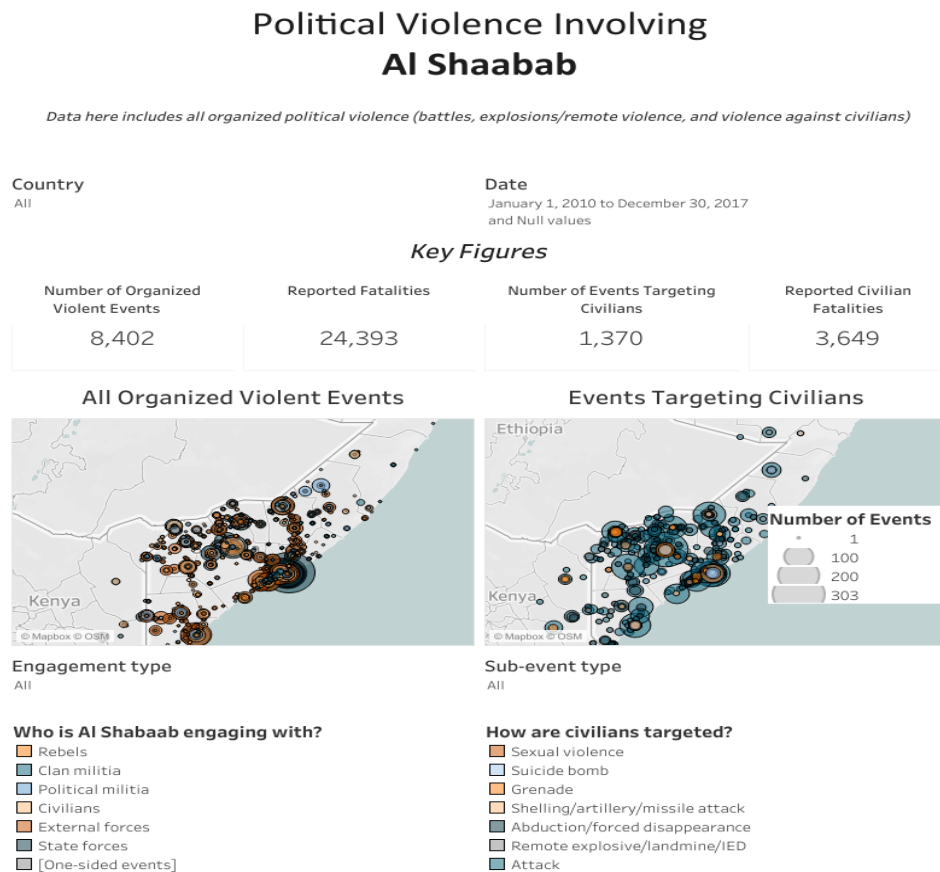
1.1 Latar Belakang Masalah

Pasca jatuhnya Islamic Courts Union sebagai dampak dari serangan tentara nasional Ethiopia dalam memperkuat posisi Pemerintah Transisional Federal Somalia, Harakat Al-Shabaab Al-Mujahidin atau Al-Shabaab yang sebelumnya menjadi lembaga pertahanan Somalia lantas berdiri secara independen untuk menjadi kelompok oposisi pemerintah. Upaya Al-Shabaab dalam delegitimasi pemerintah dilakukan dengan membangun narasi radikalisme Islam hingga melakukan berbagai serangan demi terciptanya jarak yang jauh antara pemerintah dengan masyarakat Somalia (Botha & Abdile, 2014: 5). Eksistensi Al-Shabaab yang tidak hanya sebagai kelompok oposisi melainkan pula sebagai kelompok terorisme agama lantas memunculkan urgensi pihak asing untuk melakukan deradikalisasi sebagai respon dalam penanganan ancaman keamanan global. Meskipun gerakan terorisme berbasis agama telah muncul di era Perang Dingin pada tahun 1950an, namun adanya tragedi penyerangan 9/11 pada tahun 2001 di Amerika Serikat mampu meningkatkan bentuk antisipasi negara, khususnya negara dengan basis sekuler tertentu, untuk kian menguatkan posisi keamanan strategis masing-masing wilayah (Borum, 2011: 199). Pergerakan terorisme yang tidak dapat diprediksi dalam dimensi ruang dan waktu lantas memicu berbagai negara maupun institusi internasional untuk terus berupaya menangani potensi ancaman yang timbul dari kelompok radikalisme agama tertentu (Botha & Abdile, 2014: 6).

Hal ini juga dapat diamati pada upaya regional dan internasional dalam meredam pengaruh Al-Shabaab di Somalia. Pasca didirikannya *Transitional Federal Government* atau TFG, Islamic Courts Union yang kala itu menjadi penguasa rezim pemerintahan negara lantas mengalami delegitimasi secara drastis. Delegitimasi Islamic Courts Union lantas berdampak pada penerapan konstitusi syariah yang kini tidak terlembaga dan terstruktur, sehingga pendirian Pemerintah

Transisional Federal Somalia yang digagas oleh PBB maupun beberapa negara Barat seperti Amerika Serikat dan Perancis memunculkan sentimen intoleran terhadap kultur Barat seiring dengan rusaknya tatanan konstitusi syariah yang telah terbentuk (Hanson, 2008). Selain mengembalikan Somalia menjadi negara Islam seutuhnya dengan konstitusi syariah, Al-Shabaab pun juga bertujuan untuk melawan pengaruh kultur Barat yang dianggap berseberangan dengan ajaran agama yang dimiliki. Adanya sentimen tersebut lantas memicu Al-Shabaab menghimpun massa dari masyarakat Somalia untuk bersikap resisten terhadap pengaruh eksternal yang menghalangi upaya pengembalian Somalia menjadi negara Islam dengan konstitusi syariah (Hansen, 2017: 83).

Selain ancaman terorisme domestik di Somalia, kekhawatiran negara-negara lain di kawasan ataupun lingkup internasional disebabkan pula oleh potensi meluasnya penyebaran ideologi fundamentalis yang dimiliki. Meskipun pada awalnya Al-Shabaab merupakan kelompok independen yang berupaya menerapkan radikalisme agama di Somalia, namun karena adanya kesamaan pandangan, maka beberapa organisasi fundamentalisme serupa seperti Al-Qaeda di Irak, Suriah, dan Yaman pun turut membantu pendanaan eksternal dalam aktivitas penyerangan Al-Shabaab (Hesterman, 2014: 110). Adanya kesepahaman dalam menciptakan negara Islam berbasis konstitusi Syariah mampu menjadi urgensi kerjasama beberapa organisasi tersebut. Apabila tidak segera dicegah, pergerakan Al-Shabaab yang didukung oleh beberapa kelompok fundamentalisme lainnya mampu mengalami perluasan sehingga permasalahan keamanan akan kian kompleks. Tak hanya itu, penguatan posisi Al-Shabaab akibat dukungan dari beberapa organisasi serupa lantas mampu menjadi pemicu atau potensi timbulnya kelompok fundamentalisme agama di negara lain (Ingiriis, 2018a: 9).

Gambar 1.1 Peta dan Jumlah Serangan Al-Shabaab dari 2010 hingga 2017

Sumber: www.accleddata.com

Tren serangan terorisme Al-Shabaab yang terus menguat sejak 2010 lantas memunculkan insekuritas tersendiri bagi beberapa negara. Insekuritas tersebut lantas direspon dengan upaya deradikalisasi, khususnya dengan operasi militer dari beberapa pihak seperti Uni Afrika, PBB, maupun beberapa negara kawasan lain seperti Ethiopia, Kenya, hingga negara diluar kawasan seperti Amerika Serikat dan Perancis. Kendati demikian, berbagai operasi militer yang dilakukan belum mampu menuntaskan permasalahan Al-Shabaab di Somalia (Ingiriis, 2018b: 12). Meskipun beberapa pasukan Al-Shabaab telah menjadi korban operasi militer yang dilakukan, namun posisi Al-Shabaab di tengah masyarakat tetap tidak terpengaruh. Al-Shabaab pun justru kian mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat pasca penyebaran sentimen intoleran yang mengungkapkan jika pihak

eksternal yang tidak setuju dengan pergerakan Al-Shabaab ialah anti-Islam (Ingiriis, 2018a: 10).

Narasi tersebut lantas memicu penguatan sentimen kebencian atas warga negara asing yang datang dan menetap di Somalia meskipun memiliki tujuan kemanusiaan, khususnya bagi masyarakat berkulit putih dan tidak beragama Islam. Keadaan ini semakin memberikan signifikansi bagi Al-Shabaab untuk menjaga keberlangsungan kelompok seiring peraihan simpati dan dukungan masyarakat lokal Somalia (Hoffman, 2015: 206). Demi menutup celah atas pengaruh asing yang mengancam eksistensi Al-Shabaab, kelompok ini lantas memperluas fokus dan visi aktivitas dari yang semula bersifat nasionalis religius seiring upaya untuk mengembalikan kejayaan Somalia seperti era lampau, lantas beralih menjadi jihadis internasional untuk memerangi berbagai bentuk kekuatan non-Islam sebagai respon atas penindasan dan solidaritas umat Islam di seluruh dunia. Keadaan ini kemudian memiliki konsekuensi dalam penerapan ideologi Salafisme secara ekstrem dalam kehidupan bermasyarakat (Botha & Abdile, 2014: 8). Al-Shabaab lantas mulai masuk ke dalam berbagai ranah personal masyarakat demi menjamin kemurnian Salafisme yang dianggap mampu menjadi upaya melawan bangsa Barat. Secara khusus, Al-Shabaab telah memantau masyarakat dengan pelarangan keras terhadap penggunaan busana yang tidak mencerminkan nilai syariat Islam, pemakaian alat komunikasi elektronik, penggunaan media massa, hingga kebebasan dalam mengakses dunia hiburan yang bersifat rekreasi (Chiluwa, 2017: 7).

Isolasi masyarakat Somalia terhadap interaksi dengan pihak atau pengaruh asing secara ideal seharusnya mampu memperkuat posisi Al-Shabaab sebagai satu-satunya jihadis internasional yang ada di kawasan Afrika Timur. Konstitusi Syariah beserta ideologi Salafisme yang diterapkan juga memiliki sanksi koersif dan hukuman mati bagi pihak yang melanggar, sehingga secara ideal Al-Shabaab mampu mempertahankan posisi seiring dengan kepatuhan masyarakat (IGAD, 2016: 39). Kendati demikian, progresivitas massa dan pengaruh Al-Shabaab

mengalami penurunan secara drastis menjelang akhir tahun 2018. Mengacu pada waktu yang sama, PBB yang kala itu sebagai satu-satunya pihak asing yang bertanggung jawab dalam melakukan transmisi kultural terkait penyiaran ajang pencarian bakat bertajuk Somali Pop Idol (Wenthe, 2019: 24).

Penayangan Somali Pop Idol di Somalia diawali oleh adanya pengajuan diri Fremantle Media sebagai pemegang lisensi utama ajang pencarian bakat bertajuk Idol. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya ruang lingkup kerangka deradikalisasi Somalia untuk menerapkan pendekatan lunak atau berbasis nirkekerasan dengan penekanan khusus pada sektor seni budaya dan dunia hiburan (Franklin, 2020: 84). Kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari masuknya beberapa institusi internasional seperti GCTF, UNESCO, dan UNAOC ke dalam UNSOM sebagai organisasi internasional utama dalam menghimpun basis deradikalisasi yang dilakukan di Somalia. Di lain sisi, pengajuan diri Fremantle Media turut didukung pula oleh Amerika Serikat, sebab hal tersebut merupakan manifestasi dari salah satu poin pada *US Counterterrorism Act*, khususnya optimalisasi media sebagai instrumen deradikalisasi. Pengajuan diri tersebut lantas direspon secara positif oleh PBB yang direpresentasikan oleh UNSOM (Merskin, 2019: 222).

Penerimaan PBB atas pengajuan diri Fremantle Media untuk menayangkan Somali Pop Idol berdampak pada dukungan penuh PBB terhadap ajang pencarian bakat tersebut, salah satunya ialah pelunasan biaya lisensi ajang pencarian bakat hingga penyediaan fasilitas dialog atau interaksi penyiaran antara Fremantle Media dengan Somalia National Television atau SNTV sebagai saluran yang menayangkan ajang pencarian bakat tersebut (Miladi & Mellor, 2020: 119). Dengan menggunakan media penyiaran serta budaya populer, UNSOM pun mengungkapkan jika Somali Pop Idol bertujuan untuk merestorasi industri dan budaya musik Somalia yang memiliki signifikansi di masa lampau. Dengan riwayat tersebut, Somali Pop Idol diharapkan mampu menyatukan solidaritas dan determinasi masyarakat dalam mendelegitimasi Al-Shabaab (Spiegel, 2019b).

Penayangan Somali Pop Idol yang merupakan budaya populer rintisan Inggris dan dipopulerkan oleh Amerika Serikat telah menarik atensi publik Somalia secara signifikan. Somali Pop Idol merupakan ajang pencarian bakat di bidang vokal tingkat nasional Somalia yang ditayangkan setiap minggu di SNTV sejak Februari hingga Agustus 2018 (Fenstermacher & Leventhal, 2019: 129). Secara umum, Somali Pop Idol terbagi dalam tiga babak besar dalam menyeleksi bakat menyanyi masyarakat, yakni babak audisi, eliminasi, hingga babak *live rounds* yang ditayangkan secara langsung dengan menyisakan dua belas besar peserta untuk dieliminasi tiap minggunya berdasarkan hasil dukungan masyarakat melalui pesan singkat maupun media sosial seperti Twitter. Rangkaian proses seleksi pencarian bakat di bidang vokal ini lantas diakhiri dengan konser di babak final yang menyisakan dua peserta dengan salah satunya, yakni Yasmiin Xawa menjadi pemenang dari Somali Pop Idol 2018 (Wenthe, 2019: 26).

Selama penayangan Somali Pop Idol, tercatat lebih dari 86 persen masyarakat di seluruh penjuru Somalia telah menyaksikan ajang pencarian bakat ini (Spiegel, 2019a). Kendati demikian, Somali Pop Idol tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai audiens, melainkan pula sebagai pengambil keputusan dari keberlanjutan peserta dalam kompetisi menyanyi tersebut. Secara konkret, Fremantle Media selaku pemegang lisensi utama ajang pencarian bakat bertajuk Idol mengungkapkan jika profit yang didapatkan dari hasil dukungan masyarakat terhadap peserta telah mencapai 1,87 juta dolar Amerika Serikat hanya dalam kurun waktu tiga bulan seiring dengan durasi babak *live rounds*. Di lain sisi, Brinkshurt (2019: 17) menyebutkan jika Somali Pop Idol mampu meningkatkan persentase pengguna aktif televisi Somalia yang sebelumnya hanya sebesar 13,64 persen lantas naik menjadi 67,08 persen. Kondisi ini disebabkan oleh adanya preferensi hiburan masyarakat yang dipenuhi oleh Somali Pop Idol. Secara tidak langsung, Somali Pop Idol pun meningkatkan akses penggunaan media dan perolehan informasi masyarakat Somalia secara drastis, terutama jika

dibandingkan dengan riwayat restriksi ekstrem media penyiaran dan hiburan Somalia selama operasi Al-Shabaab (Miladi & Mellor, 2020: 140).

Kondisi ini lantas semakin menggambarkan jika kepatuhan masyarakat Somalia untuk tidak mengakses media massa atau menutup berbagai akses dunia hiburan nyatanya hanya menjadi bentuk dukungan semu terhadap Al-Shabaab. Menyusul dengan minat masyarakat Somalia yang tinggi terhadap Somali Pop Idol, beberapa media massa yang selama sepuluh tahun diblokir dan dimonopoli oleh Al-Shabaab lantas kembali dibuka (Mendelsohn, 2018: 86). Tak hanya itu, Somali Pop Idol telah berdampak langsung terhadap legitimasi Al-Shabaab yang kian menurun seiring berkurangnya jumlah aktivitas kekerasan berbasis agama sebesar 59 persen dibanding sebelum penayangan ajang pencarian bakat tersebut (Spiegel, 2019b). Ketidaksejahteraan masyarakat Somalia di bawah kendali Al-Shabaab hingga harapan atas kemakmuran Somalia di masa mendatang Keadaan tersebut juga lantas menjadi konsekuensi dari peningkatan keterbukaan dan penggunaan media yang dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pemerintah Somalia untuk menyatukan bentuk protes dan perlawanan terhadap Al-Shabaab seiring dengan pesan persuasi publik untuk keluar dari kelompok radikal tersebut (Fenstermacher dan Leventhal 2019: 68).

Respon dan minat publik yang cukup tinggi terhadap Somali Pop Idol lantas berdampak pada terhimpunnya masyarakat secara integratif dalam melakukan resistensi nirkekerasan terhadap Al-Shabaab. Mengacu pada Fenstermacher dan Leventhal (2019: 75), muncul aktivitas pembangkangan atas berbagai penerapan konstitusi syariah radikal yang selama ini dilakukan oleh Al-Shabaab. Hal ini dapat diamati dengan berbagai bentuk pertunjukan seni seperti menyanyi dan menari di beberapa tempat publik Somalia yang sebelumnya dilarang oleh Al-Shabaab. Selain itu, penggunaan *guntiino* sebagai busana peserta perempuan Somali Pop Idol lantas menginspirasi kaum perempuan Somalia untuk melakukan gerakan dengan mengganti pakaian sehari-hari dengan busana tersebut sebagai bentuk liberasi atas operasi Al-Shabaab terhadap kebebasan berekspresi seiring

dengan aturan yang mewajibkan perempuan Somalia untuk menutup seluruh tubuh sesuai dengan syariat Islam. Berbagai respon pembangkangan dan gerakan liberasi masyarakat pun berhasil menjadi kekuatan determinan yang terhimpun menjadi satu untuk melawan Al-Shabaab. Pada akhir 2019, Al-Shabaab diperkirakan kehilangan lebih dari 72 persen anggota sebagai dampak dari delegitimasi akibat pembangkangan publik (Spiegel, 2019b).

Gambar 1.2 Penggunaan *Guntiino* oleh Perempuan Somalia



Sumber: www.somalinet.com

Penurunan massa dan pengaruh Al-Shabaab kemudian dianggap sebagai hasil dari deradikalisasi yang dilakukan PBB melalui penayangan Somali Pop Idol selama satu musim. Bagi sebagian besar pihak, hal ini merupakan prestasi PBB yang mampu berhasil menginisiasi gagasan non-koersif dalam melakukan deradikalisasi kepada masyarakat Somalia, khususnya demi degradasi pengaruh dan kekuatan Al-Shabaab (Mendelsohn, 2018: 132). Keunikan pun muncul sebab sebelumnya PBB kerap kali diidentifikasi sebagai kekuatan non-Islam yang berupaya untuk menghancurkan Somalia seiring dengan tanggung jawabnya terhadap TFG. Berbagai krisis yang terjadi di masyarakat Somalia pun kerap kali diidentifikasi sebagai akibat dari adanya kerjasama TFG bersama dengan PBB, sehingga TFG sendiri sebagai pemerintah Somalia tidak pernah memperoleh

legitimasi dan dukungan penuh dari masyarakat hanya karena afiliasinya terhadap PBB (Maher & Sheehan, 2018: 55). Terlepas dari berbagai sentimen intoleran tersebut, PBB berhasil memenangkan hati dan pikiran masyarakat Somalia sebagai esensi dari deradikalisasi yang dibuktikan dengan tingginya tingkat *disengagement* dari Al-Shabaab serta aktivitas masyarakat dalam pengembangan sektor musik hiburan yang dahulu sempat dilarang secara absolut. Kondisi ini kemudian menggambarkan jika lepasnya masyarakat Somalia dari Al-Shabaab tidak hanya berdasarkan keterlibatan fisik, melainkan pula pikiran dan psikologis (Wenthe, 2019: 29).

Selain kesuksesan PBB dalam menggunakan instrumen non-militer dalam upaya deradikalisasi, keunikan dalam fenomena ini juga dapat diamati pada penggunaan budaya populer. Semenjak tahun 2001, Amerika Serikat yang memegang lisensi utama atas ajang pencarian bakat bertajuk Idol mengakui jika setiap korporasi penyiaran yang membeli lisensi tersebut hanya mengembangkan acara Idol demi peraihan profit di sektor hiburan (Zwan & de Bruin, 2019: 25). Fremantle Media selaku pihak manajemen lisensi dari ajang pencarian bakat tersebut juga menambahkan jika hampir tidak ada riwayat negara yang berideologi konservatif agama dalam pembelian lisensi ajang pencarian bakat bertajuk Idol di negaranya. Hal ini disebabkan oleh afiliasi budaya populer tersebut cukup lekat dengan identitas liberal dan sekularisme yang dimiliki Amerika Serikat, sedangkan sebagian besar negara berideologi konservatif agama menentang hal tersebut (Zwan & de Bruin, 2019: 28). Kontradiksi pun muncul seiring dengan karakteristik masyarakat yang meskipun cenderung radikal terhadap agama, Somali Pop Idol sebagai budaya populer dari Amerika Serikat ini mampu diterima oleh masyarakat dan kemudian digunakan oleh PBB sebagai instrumen deradikalisasi Al-Shabaab.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Somali Pop Idol sebagai budaya populer yang didukung PBB mampu menjadi upaya deradikalisasi gerakan Al-Shabaab di Somalia?

1.3 Tinjauan Literatur

Terkait dengan tinjauan literatur, penulis berupaya menyusun secara kategorial dengan membentuk klasifikasi upaya deradikalisasi yang telah dilakukan berdasarkan *hard approach* maupun *soft approach*. Dalam membahas deradikalisasi dengan *hard approach*, terdapat tiga penelitian utama, salah satunya mengacu pada kerjasama bilateral antara Pemerintahan Transisional Federal Somalia dengan Djibouti. Hal ini dilatarbelakangi oleh pergerakan Al-Shabaab yang secara umum tidak hanya berlangsung di lingkup domestik Somalia, melainkan pula meliputi beberapa negara di wilayah timur Afrika, seperti Kenya, Ethiopia, hingga Djibouti. Kondisi ini membuat Al-Shabaab menjadi ancaman regional. Seiring dengan kerjasama antara Boko Haram dan Al-Qaeda, operasionalisasi pergerakan Al-Shabaab pun semakin meluas. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Jackson dan Aynte (2013: 12) menyebutkan jika terdapat upaya deradikalisasi Al-Shabaab seiring dengan kerjasama antara Pemerintahan Transisional Federal Somalia dan Djibouti yang ditandai dengan pendirian *Alliance Reliberation of Somalia Djibouti* atau ARS-D. Dalam perjanjian tersebut digagas jika Somalia perlu menghentikan berbagai penyerangan bersenjata domestik yang mampu mengancam kehidupan warga sipil. Sebagai gantinya, Djibouti akan menyalurkan pasukan keamanan serta mendistribusikan berbagai bantuan logistik untuk warga sipil (Olesen, 2009: 118).

Kendati demikian, perjanjian ini pun tidak berjalan dengan seharusnya. Hassan Dahir Aweys yang kala itu menjadi pemimpin Al-Shabaab tetap melakukan penyerangan sebab tidak ada representasi Al-Shabaab yang dilibatkan dalam perumusan perjanjian tersebut (Olesen, 2009: 134). Tak hanya itu, kondisi geografis Djibouti yang berada di utara Somalia juga kurang mampu menjangkau wilayah vital yang terdampak radikalisis, yakni wilayah selatan Somalia, sebab wilayah selatan telah menjadi basis pertahanan Al-Shabaab, khususnya di Mogadishu. Hal ini membuat distribusi bantuan logistik maupun pangan pun membutuhkan waktu yang lama dan kerap kali tidak sampai tepat sasaran. Selain

itu, wilayah geografis Djibouti yang tidak terlalu besar hanya membuat populasi yang ada tidak sebanding dengan Somalia. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan antara pasukan keamanan Djibouti yang dikirim untuk menjadi agen deradikalisasi Somalia. Adanya kesenjangan pasukan keamanan Djibouti dalam deradikalisasi Al-Shabaab lantas menciptakan konsekuensi pada stagnansi implementasi perjanjian *Alliance Reliberation of Somalia Djibouti* atau ARS-D hingga saat ini (Rutherford, 2018: 46).

Gambar 1.3 Peta Kawasan Afrika Timur



Sumber: www.worldatlas.com

Bentuk lain dari upaya deradikalisasi berbasis militer dapat diamati dalam Turbivile dan Meservey (2014: 29) yang memberikan eksplanasi terhadap kerjasama Uni Afrika dan PBB. Secara konkret, bentuk kerjasama kedua institusi tersebut dapat diketahui pada pengiriman kontingen perdamaian ke Somalia demi perlawanan terhadap Al-Shabaab (Vidino, 2016: 9). Tak hanya itu, kerjasama antara PBB, khususnya Dewan Keamanan dengan Uni Afrika juga terlihat pada pendirian African Union Mission in Somalia. Bentuk dukungan Dewan Keamanan dapat dilihat pada penciptaan nota kesepahaman sebagai bentuk justifikasi dua institusi tersebut untuk mendorong Uni Afrika secara langsung bertindak asertif dalam operasi militer melawan Al-Shabaab. Ethiopia sebagai ibukota diplomatik

Uni Afrika bersama dengan Kenya pun ditunjuk sebagai pemimpin dari pergerakan African Union Mission in Somalia. Demi intensifikasi operasi militer dalam rangka deradikalisasi Al-Shabaab, Amerika Serikat menyatakan secara akan memberikan bantuan finansial dan logistik persenjataan kepada Ethiopia dan Kenya masing-masing dari wilayah perairan dan daratan. Hal ini bertujuan untuk mengepung pengaruh Al-Shabaab sehingga deradikalisasi dapat dilakukan seiring dengan ancaman yang timbul dan dipersepsikan oleh masyarakat Somalia (Turbivile & Meservey, 2014: 30).

Kendati demikian, hal ini tidak menjadi ancaman khusus bagi Al-Shabaab sebab jejaring kelompok radikal yang dimiliki telah mencapai Ethiopia dan Kenya, sehingga jika kedua negara tersebut melakukan penyerangan terhadap Somalia, anggota Al-Shabaab yang berada di Kenya dan Ethiopia akan melakukan serangan balasan di masing-masing negara. Hal ini pun menimbulkan ancaman, selain menciptakan potensi radikalisme di kedua negara sebagai ancaman internal, masyarakat Somalia pun terus mengalami indoktrinasi seiring dengan pembentukan persepsi buruk kepada kedua negara (Anderson & McKnight, 2015: 102). Al-Shabaab membangun narasi jika Ethiopia dan Kenya merupakan negara anti-Islam, sehingga muncul urgensi untuk melakukan penyerangan terhadap kedua negara. Ancaman serangan kepada Ethiopia dan Kenya pun tidak hanya bersifat internal, melainkan pula eksternal seiring dengan persepsi buruk yang terus diciptakan secara progresif. Deradikalisasi yang dilakukan justru berpotensi menimbulkan potensi konflik baru dan sentimen buruk pada kedua negara (Vidino, 2016: 14).

Bentuk lain dari kerjasama Uni Afrika dan PBB juga dapat dilihat pada pengesahan Resolusi 276 Uni Afrika yang membahas mengenai aktivitas terorisme di kawasan. Dalam Resolusi 276 disebutkan bahwa dalam situasi mendesak, Uni Afrika akan mendukung tindakan militer dari pihak eksternal kawasan untuk melemahkan kekuatan dan pengaruh teroris. Hal ini pun menjadi bentuk justifikasi intervensi militer negara di luar kawasan untuk meredam

kekuatan terorisme (Khalil, 2019: 37). Merespon resolusi tersebut, PBB pun menginisiasi United Nations Assistance Mission in Somalia demi mengupayakan perdamaian hingga meningkatkan kapasitas finansial dan militer Pemerintah Transisional Federal Somalia dalam melawan pengaruh Al-Shabaab. Selain itu, Resolusi 276 pun mampu memberi justifikasi bagi Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis pasca negosiasi di Dewan Keamanan PBB untuk meluncurkan serangan udara ke wilayah Somalia, khususnya Mogadishu demi mereduksi jumlah massa Al-Shabaab dan memberikan ancaman terhadap tumbuhnya potensi radikalisasi secara lebih jauh (Mkutu, 2015: 89). Kendati beberapa pasukan Al-Shabaab menjadi korban dalam serangan udara tersebut, namun esensi dari deradikalisasi pun tidak muncul secara signifikan. Secara kontradiktif, konsekuensi dari serangan udara dari ketiga negara tersebut justru meningkatkan sentimen intoleran terhadap nilai dan kultur Barat yang berseberangan terhadap karakteristik masyarakat Somalia yang konservatif religius (Jones & Liepman, 2016: 78).

Terkait dengan beberapa tinjauan di atas, dominasi literatur yang hanya membahas penangkalan terorisme ataupun deradikalisasi menggunakan *hard approach* terhadap Al-Shabaab lantas menciptakan urgensi bagi penulis untuk meneliti dari perspektif lain. Mengacu pada upaya deradikalisasi *hard approach* yang kurang memberikan dampak signifikan, penulis berupaya untuk meneliti deradikalisasi berbasis pendekatan lunak atau *soft approach*. Penulis pun menemukan celah seiring dengan rendahnya jumlah deradikalisasi dengan basis pendekatan lunak yang dilakukan. Berbagai literatur hanya berfokus dalam upaya penangkalan terorisme, sehingga hanya serangan fisik yang berusaha untuk diredam, tetapi akar permasalahan dari terorisme tersebut tidak terselesaikan. Mengacu pada upaya deradikalisasi *hard approach* yang kurang memberikan dampak signifikan, muncul urgensi bagi penulis untuk meneliti deradikalisasi berbasis pendekatan lunak atau *soft approach*.

Mengacu pada hal tersebut, terdapat satu literatur yang mulai membahas adanya upaya deradikalisasi berbasis nirkekerasan yang mulai dilakukan di Somalia.

Wenthe (2019: 16) memberikan eksplanasi dari kajian etnomusikologi sebagai instrumen deradikalisasi di kawasan Sahel. Dengan mengambil contoh di Somalia, literatur ini secara elaboratif menyebutkan jika produk musik lokal Somalia merupakan salah satu instrumen yang mampu digunakan untuk melakukan redefinisi identitas masyarakat Somalia. Hal ini disebabkan oleh narasi Al-Shabaab yang hanya mengidentifikasi masyarakat Somalia dari segi religius, namun tidak memandang diversitas masyarakat dari struktur sosial, ekonomi, dan politik. Dengan sifat musik yang mampu memengaruhi sisi psikologis para pendengarnya, Wenthe (2019: 36) pun berargumen jika musik lokal Somalia dapat digunakan untuk refleksi emosional masyarakat atas kondisi sosial yang terjadi di Somalia, terutama terkait dengan opresi Al-Shabaab.

Meskipun demikian, penulis memandang jika dalam upaya deradikalisasi di Somalia, tidak hanya produk musik lokal belaka yang memiliki peran. Sebaliknya, produk musik Barat yang selama ini direstriksi penggunaannya oleh kelompok Al-Shabaab memunculkan adanya isolasi kultural yang membuat keterasingan antara masyarakat Somalia terhadap budaya luar. Adanya sentimen kebencian dan narasi intoleran terhadap produk kultur Barat merupakan salah satu upaya agar basis pendukung kelompok tersebut tidak terfragmentasi (Legum, 2019: 511). Terkait dengan hal tersebut, penulis lantas membentuk penelitian ini didasarkan pada penayangan Somali Pop Idol sebagai budaya populer rintisan negara Barat dalam merekonstruksi pemikiran masyarakat Somalia secara inklusif. Penggunaan budaya populer sebagai instrumen deradikalisasi non-koersif menjadi daya tarik tersendiri untuk dikaji seiring penerimaan masyarakat Somalia terhadap Somali Pop Idol yang terafiliasi dengan Amerika Serikat sebagai pemegang lisensi utama dari ajang pencarian bakat tersebut. Anomali pun muncul sebab meskipun masyarakat Somalia yang cenderung konservatif hingga radikal dalam aspek religi seiring dengan resistensi terhadap nilai-nilai dan produk kultural dari Barat, tetapi Somali Pop Idol dapat mampu diterima hingga berhasil merekonstruksi pemikiran masyarakat seiring dengan terintegrasinya solidaritas dan determinasi publik untuk melawan Al-Shabaab secara nirkekerasan.

1.4 Kerangka Berpikir

Dalam menganalisis Somali Pop Idol sebagai instrumen deradikalisasi Al-Shabaab, penulis menggunakan empat kerangka dasar yang digunakan semakin spesifik. Dimulai dengan kerangka deradikalisasi yang menjadi unsur esensial dari penelitian ini, penulis kemudian memilih pendekatan lunak atau *soft approach* seiring dengan kesesuaian bentuknya terhadap Somali Pop Idol yang merupakan instrumen non-koersif. Dalam pendekatan lunak tersebut, penulis secara spesifik mengaitkan konsep budaya populer dan eksistensinya terhadap suatu ideologi yang berkembang di kalangan masyarakat. Hal ini pun berupaya untuk menjelaskan posisi budaya populer yang memiliki kapasitas untuk menyajikan preferensi ideologi baru pasca degradasi relevansi suatu ideologi di kalangan masyarakat. Terkait dengan keterbukaannya pada pembukaan preferensi ideologi baru, budaya populer pun mengandung perspektif liberalisme kultural dan pluralisme liberal yang mampu mengembalikan serta menjamin kebebasan masyarakat untuk menyesuaikan diri dalam memilih ideologi baru yang tepat maupun menjaga pluralitas yang ada sebagai identitas bersama. Mengacu pada kedua konsep tersebut, penghargaan akan diferensiasi sosial, serta perlindungan terhadap kebebasan hak asasi manusia menjadi premis utama. Secara praktis, hal tersebut hanya dapat dilakukan dalam kerangka kosmpolitanisasi.

1.4.1 Deradikalisasi dengan Pendekatan Lunak

Menurut Ashour (2008: 14), deradikalisasi ialah proses yang mengarahkan individu atau kelompok untuk mengubah perilakunya terkait aksi kekerasan, khususnya terhadap warga sipil. Secara umum, deradikalisasi menghasilkan perubahan ideologi dan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat. Apabila mengacu pada keputusan individual untuk menerima proses deradikalisasi, kerap kali hal ini dilatarbelakangi oleh pengalaman traumatik individu. Kondisi ini biasanya dialami individu seperti tindak kekerasan langsung dari elit kelompok, tidak mendapatkan insentif dan manfaat sesuai dengan yang dijanjikan, hingga subordinasi dan marginalisasi selama berada dalam kelompok radikal

(Magouirk, 2008: 8). Trauma dari berbagai kejadian tersebut lantas menjadi pemicu transformasi keyakinan individu terhadap keyakinan yang dimiliki, sehingga individu atau masyarakat kembali skeptis dan mengalami krisis kepercayaan terhadap ideologi dan relasi sosial yang dianut. Selain itu, upaya deradikalisasi juga dilatarbelakangi oleh faktor pendorong dan penarik (Norrick, 2009: 49). Mengacu pada faktor pendorong, terdapat kekuatan sosial yang membuat individu atau masyarakat tidak ingin melanjutkan keanggotaannya dalam kelompok radikal. Hal ini dapat dianalisis seperti tuntutan pidana, penolakan dari keluarga atau masyarakat terkait dengan tindak kekerasan yang selama ini dilakukan, hingga pergeseran fokus dan tujuan setelah berada di kelompok. Di lain sisi, Norrick (2009: 56) juga mengemukakan faktor penarik sebagai daya tarik sosial individu untuk mencari alternatif kehidupan lain yang lebih prospektif. Faktor penarik pun meliputi keinginan untuk memiliki profesi dan peluang pendidikan baru, serta menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik.

Secara khusus, upaya deradikalisasi memiliki diferensiasi dalam pendekatan yang digunakan, yakni *hard* dan *soft*. Mengacu pada *hard approach*, deradikalisasi menjadi suatu upaya yang mengandalkan penindakan dan penangkapan anggota kelompok radikal menggunakan cara koersif. Hal ini meliputi pula operasi militer baik melalui jalur darat, laut, maupun udara untuk mendeteksi keberadaan kelompok radikal suatu wilayah untuk kemudian diserang (Hughes, 2010: 117). Selain mereduksi anggota kelompok radikal, upaya deradikalisasi pun muncul seiring dengan ancaman penyerangan yang dipersepsikan oleh anggota kelompok radikal atau masyarakat lain yang tersisa. Di lain sisi, terdapat pula deradikalisasi dengan pendekatan *soft* yang merujuk pada rehabilitasi sosial masyarakat secara kolektif. Kondisi ini dilakukan dengan upaya pihak fasilitator deradikalisasi untuk menjangkau masyarakat secara inklusif dalam memberikan arahan secara eksplisit maupun implisit mengenai ideologi dan perilaku yang dapat diterima oleh seluruh kalangan secara universal (Rafique & Ahmed, 2013: 13). Dengan upaya nirkekerasan, deradikalisasi pendekatan lunak memiliki agenda utama untuk

menyadarkan masyarakat jika ideologi konservatif ekstrem bukanlah suatu hal yang tepat. Sosialisasi kesadaran pun dilakukan secara bertahap sesuai dengan karakteristik dan penerimaan masyarakat. Sebagai suatu konsep yang cukup universal, pihak deradikalisasi berupaya mengedukasi masyarakat untuk hidup berdampingan dan toleran terlepas dari berbagai perbedaan yang dimiliki. Indikator keberhasilan dari deradikalisasi lantas dapat diamati pada *disengagement* dari anggota kelompok hingga perlawanan publik sebagai upaya delegitimasi kelompok tersebut. Hal ini merupakan konsekuensi dari penerimaan gagasan atau pemikiran baru yang lebih relevan dan inklusif (Hughes, 2010: 128).

Kendati demikian, dalam beberapa kurun waktu terakhir, penggunaan *soft approach*, lebih diunggulkan dibanding *hard approach*. Secara umum, hal ini disebabkan oleh kesulitan untuk mengidentifikasi masyarakat yang telah terpapar radikalisme, sehingga operasi militer berpeluang untuk tidak tepat sasaran (Marrin, 2012: 19). Permasalahan mengenai penyerangan dari kelompok radikal tidak hanya mengacu pada perilaku belaka, melainkan akar dari tindakan penyerangan tersebut yakni pola pikir dan ideologi yang dianut. Meskipun memiliki efek ancaman yang menjadi daya tarik individu menerima proses deradikalisasi, namun efektivitas *hard approach* dalam deradikalisasi kerap kali dipertanyakan sebab konstruksi pemikiran masyarakat tidak tercipta secara signifikan. Operasi militer pun justru berpotensi untuk meningkatkan stigma dan sentimen negatif kepada pihak musuh atau lawan kelompok radikal, sehingga muncul kemungkinan dalam aktivitas penyerangan yang lebih ekstrem. Tak hanya itu, operasi militer juga rentan akan eskalasi konflik lebih lanjut (Marrin, 2012: 21). Adanya kepentingan politik dari masing-masing pihak deradikalisasi kerap kali diaplikasikan dalam operasi militer tersebut, sehingga tujuan utama dan murni dari deradikalisasi akan tergeser. Apabila eskalasi konflik terus berlanjut, maka timbul potensi perang yang mampu melibatkan kalangan masyarakat kolektif. Kondisi ini kemudian akan kian memperburuk keadaan sebab deradikalisasi tidak berjalan secara tepat, namun perang yang muncul justru mampu melanggar hukum humaniter internasional (Marrin, 2012: 24).

Selain itu, terorisme yang dilakukan oleh kelompok radikal tidak memiliki batas waktu yang jelas mengenai awal dan akhir. Adanya operasionalisasi tertutup oleh pihak kelompok radikal membuat pihak deradikalisasi sulit untuk menentukan waktu yang tepat untuk operasi militer. Untuk menyeimbangi karakteristik dari terorisme yang cukup fleksibel dalam dimensi waktu, dibutuhkan pula upaya yang sesuai (Marrin, 2012: 25). Namun, operasi militer pun cenderung kurang fleksibel sebab perlu adanya perancangan strategi dan peran dari seluruh pasukan sebelum melakukan operasi militer sehingga waktu yang dibutuhkan tidak singkat. Adanya responsibilitas pihak deradikalisasi juga turut membatasi arah dan daya jangkau operasi militer tersebut dilakukan, sebaliknya terorisme dari kelompok radikal pun tidak memiliki batas dan responsibilitas tertentu dalam melakukan serangan (Marrin, 2012: 26).

1.4.2 Budaya Populer sebagai Instrumen Deradikalisasi Pendekatan Lunak

Dalam studi Hubungan Internasional, budaya populer memiliki fungsi untuk membentuk norma, nilai, identitas, maupun gagasan (Kangas, 2009: 8). Secara spesifik pada upaya deradikalisasi dengan menggunakan *soft approach*, budaya populer mampu menjadi instrumen signifikan terkait dengan menjangkau masyarakat secara inklusif dan bertahap dalam melakukan rekonstruksi pemikiran dari ideologi yang dianut. Ideologi merupakan sistem kepercayaan yang menghasilkan makna dan tindakan spesifik dan memiliki efek tertentu (Fluck, 2001: 28). Hal ini pun membuat ideologi mampu menghasilkan nilai ataupun norma yang menggerakkan kelompok masyarakat untuk bertindak sesuai dengan konstruksi sosial yang terbentuk. Perkembangan ideologi yang diterapkan dalam masyarakat mampu menciptakan tatanan sosial tertentu dan secara masif mampu membentuk karakteristik sosiokultural masyarakat menjadi konservatif. Namun, karena perkembangan ideologi bersifat eksponensial, maka dalam penerapannya ideologi akan menjadi usang dan tidak relevan lagi di kalangan masyarakat (Bennet, 1981: 120).

Merujuk pada kondisi tersebut, masyarakat berupaya mengekspresikan kekecewaan atau frustrasi akibat penerapan ideologi konservatif atau radikal yang sudah tidak relevan (Grayson, 2009: 11). Keadaan ini kemudian memunculkan respon masyarakat untuk mencari ideologi ataupun nilai baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Proses ini kemudian memunculkan budaya populer seiring dengan kapasitasnya sebagai reaksi publik dalam mengubah kecemasan ataupun keprihatinan masyarakat kolektif akibat nilai atau norma yang dipengaruhi ideologi yang telah tidak relevan. Fungsi budaya populer sebagai instrumen deradikalisasi akan muncul dalam persinggungan antara peristiwa sosial aktual atau keprihatinan mendasar yang terus menerus terjadi di masyarakat (Bennet, 1982: 123). Selain menciptakan popularitas, adanya penyinggungan terhadap peristiwa sosial aktual di masyarakat mampu membentuk kesadaran publik yang berpengaruh pada peraihan sensitivitas sisi sosiopsikologis dan kultural masyarakat. Dalam beberapa periode tertentu, terbentuk suatu solidaritas di kalangan masyarakat atas kesepahaman dalam perolehan ideologi baru yang lebih relevan. Dalam hal ini, budaya populer mampu menjadi wadah esensial dalam penyedia tatanan normatif dan ideologi baru dari pihak fasilitator deradikalisasi (Lipsitz, 1990: 10).

Secara lebih rinci, budaya populer sebagai instrumen deradikalisasi merupakan bentuk dari penyampaian pesan tertentu atas kejenuhan atau irrelevansi ideologi yang berkembang di masyarakat. Ketika budaya populer mampu menjangkau masyarakat, maka terbentuk suatu wadah yang memungkinkan adanya penyamaan persepsi masyarakat antara pesan yang terkandung dalam budaya populer dengan kepentingan, preferensi, dan situasi yang sedang berlangsung. Kesamaan tersebut akan memengaruhi pola perilaku masyarakat sebagai konsumen dari budaya populer (Fenstermacher & Leventhal, 2019: 69). Dalam perkembangannya, budaya populer yang memiliki daya tarik tinggi terkait akses kebutuhan hiburan kemudian akan menarik minat masyarakat tertentu. Dengan esensi deradikalisasi yang berupaya untuk memenangkan hati dan pikiran kelompok radikal, maka minat tersebut selanjutnya membangun kedekatan emosional dengan masyarakat,

sehingga konten yang terdapat dalam budaya populer cenderung untuk ditiru yang kemudian berimplikasi pada perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat secara perlahan (Fenstermacher & Leventhal, 2019: 73). Merujuk pada kekuatan psikologis tersebut, budaya populer mampu meredam pemikiran radikal seiring dengan promosi dan advokasi nilai-nilai kemanusiaan, nirkekerasan, hingga liberalisme kultural.

Sebagai instrumen deradikalisasi, budaya populer tidak melawan tatanan normatif secara langsung sebab tidak ada seperangkat gagasan atau tindakan moral yang terlegitimasi di dalamnya (Grayson, 2009: 14). Tak hanya itu, budaya populer pun tidak bersifat memberontak terhadap kultur dominan atau justru secara eksklusif merepresentasikan kelas sosial tertentu. Hal ini pun mampu menjadi keunggulan budaya populer sebab dengan ketiadaan tatanan normatif atau seperangkat gagasan yang terlegitimasi, deradikalisasi dapat dengan optimal dijalankan tanpa memiliki pertentangan ideologi dengan kelompok radikal. Hal ini pun membuat budaya populer dapat diakses secara inklusif, namun kemudian memiliki implikasi yang signifikan dalam merekonstruksi pemikiran masyarakat seiring dengan kapasitasnya yang mampu merefleksikan kondisi konkret yang terjadi di masyarakat (Bigsby, 1976: 124). Selain itu, sebagai instrumen deradikalisasi, budaya populer memiliki kapasitas dalam penggunaan sumber daya ekspresif untuk bereaksi terhadap norma atau nilai dominan yang selama ini dianggap mengekang. Keunggulan lain dari budaya populer pun dapat terlihat seiring dengan sifat eskapisme yang dimiliki dalam memberikan preferensi ideologi dan norma baru seiring dengan menghindarkan masyarakat dari irelevansi hingga konservatisme ideologi. Terkait dengan hal tersebut, budaya populer pun merupakan bentuk kontradiksi dari konservatisme dan isolasi sosiokultural. Dalam kapabilitasnya sebagai instrumen deradikalisasi, budaya populer mengandung konsep liberalisme kultural serta pluralisme liberal seiring dengan kebebasan masyarakat untuk mencari ideologi yang baru dan sesuai (Bordieu, 1984: 148).

1.4.3 Liberalisme Kultural dan Pluralisme Liberal

Dalam konteks liberalisme kultural dan pluralisme liberal, radikalisme merupakan bentuk antitesis dari keduanya. Hal ini dapat diamati pada sifatnya yang berbentuk depluralisasi yang mengarah pada eksklusivitas pemikiran dengan mengesampingkan, memarginalkan, hingga mendiskriminasi beragamnya ideologi dan identitas lain yang berkembang dalam masyarakat. Kondisi ini membuat diperlukannya liberalisme kultural sebagai perspektif yang memandang kebebasan masyarakat dalam mengekspresikan identitas diri sendiri tanpa bentuk pengekanan apapun (Bohman, 1995: 7). Konsep ini menekankan pada apresiasi masyarakat terhadap berbagai diferensiasi ras, etnis, agama, ataupun karakteristik budaya lainnya. Di lain sisi, terdapat pula pluralisme liberal sebagai bentuk kebebasan berpendapat khususnya dalam sektor politik maupun berekspresi dalam elemen masyarakat. Meskipun terkesan serupa, namun pluralisme liberal lebih merujuk pada sektor politik masyarakat seiring dengan advokasi dalam kesetaraan hak asasi manusia (Okane, 2010: 31). Mengacu pada proses deradikalisasi, kedua konsep ini menjadi kian esensial seiring dengan fungsi dekonstruksi pada radikalisme yang terbentuk. Hal ini dapat diamati pada kombinasi keduanya yang berupaya untuk mengadvokasi kendali pemerintahan yang tidak absolut (Freedon, 1994: 12). Selain itu, adanya penyeruan terhadap nilai-nilai demokrasi, apresiasi terhadap diferensiasi sosiokultural masyarakat, hingga perlawanan terhadap pemaksaan atas homogenisasi budaya menjadi kian penting demi merekonstruksi pemikiran radikal yang telah dimiliki masyarakat. Dengan demikian, liberalisme kultural dan pluralisme liberal bergerak dalam kerangka repluralisasi demi pengikisan potensi radikalisme. Secara spesifik, kerangka repluralisasi akan bergerak secara lebih komprehensif dalam proses kosmopolitanisasi seiring dengan berbagai nilai humanis yang ada di dalamnya (Dusche, 2004: 17).

1.4.4 Kosmopolitanisasi

Dengan adanya upaya repluralisasi yang muncul dari liberalisme kultural dan pluralisme liberal, maka akan muncul proses internalisasi kalangan yang sebelumnya termarginalisasi. Keadaan ini lantas menandai dimulainya

kosmopolitanisasi seiring lepasnya dikotomi *in-group* dan *out-group* yang menjadi titik awal dari radikalisme atas isolasi dan eksklusivitas suatu kalangan dari latar belakang kultural tertentu (Cheah & Robbins, 1998: 216). Kosmopolitanisasi akan membentuk interkoneksi antara individu, kelompok, dan masyarakat dengan berbagai gagasan, preferensi, norma, dan latar belakang kultural yang beragam. Kondisi ini membuat kosmopolitanisasi menjadi suatu proses yang asimetris dan saling bergantung antar masyarakat terlepas dari batas-batas negara secara geografis. Bagi negara, kosmopolitanisasi akan memiliki konsekuensi dalam meningkatnya peran individu dan masyarakat, sehingga interaksi tidak hanya didominasi oleh antarnegara, melainkan terbentuk pula relasi transnasional, global dengan lokal, maupun global dengan nasional (Beck, 2002: 12).

Secara ideal, kosmopolitanisasi diawali dengan adanya ketegangan kultural sebagai konsekuensi dari polarisasi budaya. Kondisi ini disebabkan oleh persepsi ancaman penetrasi kultural dari satu pihak ke pihak lain, sehingga muncul efek isolasi struktur sosial yang mengakibatkan pada eksklusivitas pada satu pihak dan keterasingan pada pihak lainnya. Kendati demikian, globalisasi yang memicu pudarnya batas-batas negara membuat berbagai isu berkembang tidak hanya di lingkup negara tetapi juga lintas batas (Beck, 2006: 15). Isolasi dan keterasingan kultural lantas hanya membuat tidak adanya potensi kooperasi atas penyelesaian isu lintas batas, sehingga dibutuhkan kerangka integrasi dan sinergi kultural yang mampu secara kolaboratif menjadi solusi dalam penyelesaian isu dan ancaman global. Kosmopolitanisasi kemudian muncul sebagai respon untuk meredam ketegangan kultur yang timbul demi adanya fokus dalam penanganan ancaman atau isu global. Dengan mengedepankan dialog dan interaksi lintas budaya yang dilakukan antar pihak, kosmopolitanisasi berupaya untuk menginternalisasi seluruh polarisasi maupun diversitas kultural yang terbentuk menjadi kerangka masyarakat yang lebih integratif (Sznaider & Winter, 2003: 96). Kosmopolitanisasi lantas tidak hanya membentuk identitas masyarakat sebagai warga dunia, namun terdapat upaya relokalisasi, renasionalisasi, hingga

reethnicization masyarakat sehingga identitas awal masyarakat tidak benar-benar hilang, melainkan diperbarui demi keberdampingan antar kultur. Keadaan ini lantas memicu kosmopolitanisasi secara ideal mampu membuka isolasi dan keterasingan masyarakat demi mencapai progresivitas tertentu (Beck & Grande, 2012: 77).

Dalam kaitannya dengan kekuatan lunak atau *soft power*, kosmopolitanisasi akan berdampak pada pengurangan potensi konflik yang muncul antara dua polarisasi kultur atau negara (Gallaroti, 2010: 294). Kondisi ini kemudian menciptakan interaksi mutual dalam pemberian pengaruh kultur dari dua pihak, sehingga bentuk relasi yang muncul akan bersifat kooperatif dan kolaboratif. Hal ini kemudian berdampak tidak hanya pada munculnya rekognisi satu negara atau kultur dengan yang lain, melainkan pula terdapat penerimaan dan internalisasi lebih lanjut demi terbangunnya kerangka kerjasama yang lebih holistik (Gallaroti, 2010: 311). Kondisi ini selanjutnya berdampak pada relativitas posisi suatu kultur atau negara yang sebelumnya eksklusif dan terisolasi, sehingga merujuk pada akar dari radikalisme yang berawal dari marginalisasi atau eksklusivitas kultur tertentu, maka kosmopolitanisasi akan menjadi kerangka determinan dalam deradikalisasi seiring dengan kapasitasnya dalam membuka isolasi kultural, meningkatkan inklusivitas interaksi antar kultur maupun negara, hingga mengoptimalisasi rekognisi dan penerimaan pengaruh satu pihak terhadap yang lain.

1.5 Hipotesis

Terkait dengan upaya PBB dalam deradikalisasi masyarakat Somalia, khususnya Al-Shabaab, penulis memiliki hipotesis bahwa PBB menggunakan ajang pencarian bakat bertajuk Somali Pop Idol sebagai budaya populer yang mampu mewakili perasaan dan pengalaman masyarakat Somalia terhadap opresi yang dilakukan Al-Shabaab dengan menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan, liberalisme kultural, dan nirkekerasan sebagai upaya pembuka isolasi kultural baik dalam lingkup antar masyarakat maupun dengan budaya luar pasca alienasi yang dibentuk oleh Al-Shabaab.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Operasionalisasi Konsep

1.6.1.1 Budaya Populer

Budaya populer secara definitif dapat diidentifikasi sebagai produk estetik yang diproduksi dan dijual demi peraih profitabilitas dalam pasar hiburan global (Fiske, 1989: 200). Definisi ini didukung pula oleh Malthy (1989: 188) yang mengungkapkan bahwa budaya populer didominasi oleh produksi barang-barang material yang dihasilkan melalui teknik-teknik industrial produksi massa dan dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan dari khalayak konsumen massa. Selain itu, William (2018: 5) menjelaskan budaya populer sebagai sekumpulan artefak yang ada seperti film, kaset, acara televisi, alat transportasi, pakaian, dengan sifat dinamis dan muncul secara unik di berbagai tempat dan waktu. Secara umum, budaya populer memiliki beberapa karakteristik, seperti relativisme, pragmatisme, sekularisme, hedonisme, materialisme, popularitas, kontemporer, kedangkalan, penyeragaman rasa, budaya instan, budaya massa, budaya gaya, dan hiperealitas (Bennet, 1982: 123).

Dalam penelitian ini, budaya populer yang dimaksud oleh penulis adalah Somali Pop Idol sebagai program pencarian bakat yang ditayangkan di Somali National Television atau SNTV dengan didukung oleh PBB serta bekerjasama dengan Fremantle Media. Konsep budaya populer dalam penelitian ini juga merujuk pada seluruh substansi yang terdapat dalam penayangan Somali Pop Idol, seperti produk musik, busana, cara pemungutan suara, hingga penampilan para peserta maupun juri dan bintang tamu baik yang diiringi musik maupun tidak. Selain itu, bentuk budaya populer dalam penelitian ini terdapat pula pada berbagai penampilan musik maupun penggunaan busana oleh masyarakat Somalia sebagai bentuk perlawanan dan delegitimasi terhadap Al-Shabaab.

1.6.1.2 Deradikalisasi

Di lain sisi, Rafique dan Ahmed (2013: 12) memaparkan jika deradikalisasi ialah tahapan untuk meninggalkan persepsi dunia eksremis dan menyimpulkan bahwa tidak ada toleransi terhadap upaya kekerasan untuk perubahan tatanan sosial. Deradikalisasi dianggap menjadi upaya strategis sebab implikasi yang timbul ialah pencegahan terhadap eskalasi kekerasan lebih lanjut. Merujuk pada Dechesne (2014), deradikalisasi memiliki beberapa kegunaan strategis, salah satunya ialah untuk memberikan tanggapan kepada kelompok radikal yang lebih fleksibel untuk menyebarkan pandangan secara inklusif di kalangan masyarakat. Selain itu, deradikalisasi juga berfungsi untuk memberikan diferensiasi antara tindakan represif karena kepentingan politik tertentu dengan tindakan militer demi upaya delegitimasi kelompok radikal. Deradikalisasi pun mampu merekonstruksi sisi kognitif radikalisme, khususnya nilai, sikap, dan kepercayaan yang diyakini secara inklusif dan universal oleh masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, penulis berupaya menggunakan konsep deradikalisasi dengan fungsi strategis dalam tanggapan pasca penyebaran pandangan serta rekonstruksi sisi kognitif yang terpapar radikalisme. Dengan menggunakan Somali Pop Idol, penulis berupaya menjelaskan deradikalisasi pendekatan lunak mampu menjadi instrumen esensial dalam deradikalisasi Al-Shabaab di Somalia. Penulis pun berusaha untuk memaparkan upaya nirkekerasan yang terdapat dalam Somali Pop Idol sebagai budaya populer dengan pesan-pesan kemanusiaan dan liberasi dengan kapasitas untuk mendelegitimasi pengaruh serta kekuatan Al-Shabaab. Bentuk deradikalisasi dalam penelitian ini juga mencakup adanya perubahan persepsi publik terhadap Al-Shabaab seiring dengan meningkatnya krisis kepercayaan dan skeptisme terhadap kelompok tersebut selama dan pasca penayangan Somali Pop Idol. Hasil akhir sekaligus indikator dari deradikalisasi dalam penelitian ini adalah *disengagement* masyarakat dari Al-Shabaab, serta solidaritas masyarakat dalam perlawanan nirkekerasan terhadap sentimen dan narasi yang sudah terbentuk demi delegitimasi Al-Shabaab.

1.6.1.3 Kosmopolitanisasi

Mengacu pada Beck (2006: 84) kosmopolitanisasi merupakan proses dialektis non linier antara universal dan partikular atau yang serupa dengan berbeda, serta munculnya sinergi antara relasi global dengan nasional maupun global dengan lokal. Proses tersebut tidak lantas muncul sebagai polaritas budaya, tetapi membentuk adanya norma dan interaksi antar pihak yang saling bergantung. Adanya riwayat interdependensi global kemudian mengubah karakter sosial dan politik masyarakat yang ada di suatu negara. Selain itu, kosmopolitanisasi akan menekankan adanya internalisasi dan akomodasi masyarakat dari berbagai latar belakang sosial maupun budaya baik secara domestik maupun transnasional (Levy, 2013: 13). Dengan struktur sosial masyarakat yang mampu menerima diversitas tersebut, maka akan terbentuk identitas nasional kosmopolitan seiring dengan penerimaan serta kesejajaran posisi masyarakat secara global terlepas dari diversitas budaya yang dimiliki.

Mengacu pada penelitian ini, proses kosmopolitanisasi dimulai dalam penayangan Somali Pop Idol yang melepas isolasi dan alienasi masyarakat Somalia pasca radikalisme di bawah pengaruh Al-Shabaab. Secara konkret, bentuk dari kosmopolitanisasi dalam penelitian ini dapat diamati pada penerimaan publik terhadap produk budaya populer Barat yang selama ini direstriksi. Bentuk lain kosmopolitanisasi dalam penelitian ini juga terlihat dari dialog dan interaksi masyarakat antarklan Somalia, baik secara nyata maupun dalam dunia maya, yang selama ini cenderung dihindari akibat konstruksi stigma maupun sentimen dari masing-masing klan. Dengan demikian, kosmopolitanisasi dalam penelitian ini merupakan terbukanya isolasi atau keterasingan kultural di tingkat sesama masyarakat Somalia maupun dengan budaya Barat sehingga tercipta upaya kolektif dan determinasi untuk melawan pengaruh Al-Shabaab.

1.6.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian eksplanatif. Penulis berupaya untuk mengaitkan dua variabel, yakni Somali Pop Idol sebagai bentuk budaya populer yang diinisiasi PBB dalam upaya deradikalisasi Al-Shabaab.

1.6.3 Ruang Lingkup, Cakupan dan Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dapat diketahui dalam proses yang muncul pasca penayangan Somali Pop Idol dalam deradikalisasi Al-Shabaab. Jangkauan penelitian ini dimulai pada tahun 2018 semenjak Somali Pop Idol mulai ditayangkan, namun penulis juga memiliki cakupan penelitian yang mengacu pada proses hingga dampak kosmopolitanisasi pasca penayangan Somali Pop Idol. Penulis juga menyertakan beberapa data dan fakta pendukung mengenai kondisi Al-Shabaab sebelum dimulainya penayangan Somali Pop Idol demi memperkuat argumen dibutuhkan kerangka deradikalisasi dengan pendekatan lunak.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian didapatkan dari beberapa sumber sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel resmi, arsip pemerintah, dokumen resmi yang dipublikasikan, dokumen resmi organisasi internasional hingga makalah tercetak maupun yang dapat diakses secara daring.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki empat bab dengan rincian bab pertama yang berisi pendahuluan dengan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesis, dan metodologi penelitian. Pada bab kedua, penulis berupaya untuk membahas awal kemunculan Somali Pop Idol sebagai instrumen deradikalisasi Al-Shabaab. Pada bab ketiga, penulis berupaya untuk membahas hipotesis, yakni keberlangsungan Somali Pop Idol sebagai pembuka isolasi kultural yang selama ini dibentuk oleh Al-Shabaab. Pada bab keempat, penulis memberikan kesimpulan terkait penelitian ini.